



REPUBLIK INDONESIA

**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK SUDAN
MENGENAI
KERJASAMA PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan Kementerian Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Republik Sudan, selanjutnya disebut "Para Pihak";

BERKEINGINAN untuk memperluas dan memperkuat persahabatan antara kedua negara dan meningkatkan kerjasama antara para Pihak di bidang pemuda dan olahraga;

MENIMBANG perlunya mengembangkan dan membina hubungan di bidang pemuda dan olahraga, serta kerjasama antara kedua Negara;

SESUAI dengan hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan di Negara masing masing;

TELAH MENYEPAKATI hal-hal sebagai berikut:

**PASAL 1
TUJUAN KERJASAMA**

Memorandum Saling Pengertian ini bertujuan untuk memajukan pengembangan sumber daya manusia dalam bidang pemuda dan olahraga antara para Pihak atas dasar timbal balik, saling pengertian dan saling menguntungkan.

PASAL 2 BIDANG KERJASAMA

Para Pihak berupaya meningkatkan kerjasama dalam bidang-bidang sebagai berikut:

1. Urusan Kepemudaan

- a) Pertukaran kunjungan pemuda, pejabat pemerintah yang berwenang dalam pembuatan kebijakan kepemudaan atau wakil organisasi pemuda;
- b) Penyampaian undangan untuk mengikuti konferensi atau seminar tentang kepemudaan yang diselenggarakan di negara masing-masing;
- c) Pertukaran informasi tentang kepemudaan;
- d) Mendorong partisipasi dalam kemah pemuda, festival pemuda dan even-even kepemudaan lainnya yang diselenggarakan di negara masing-masing;
- e) Pertukaran pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan dan pemberdayaan pemuda;
- f) Pertukaran dalam pembentukan fasilitas-fasilitas dasar dan kepemudaan;
- g) Kerjasama pengembangan bidang kewirausahaan pemuda;
- h) Mendorong kepariwisataan pemuda dan menjadikannya sebagai jalan untuk memperdalam pengetahuan bersama tentang peradaban kedua Pihak, mendukung perdamaian dan mempererat persahabatan;
- i) Mendorong kerjasama antara organisasi pemuda dan sentra-sentra non pemerintah dari kedua negara;
- j) Kerjasama di bidang iptek kepemudaan.

2. Urusan Keolahragaan

- a) Mendorong pertukaran dibidang-bidang olahraga kompetisi, rekreasi, dan pendidikan;
- b) Mendorong partisipasi delegasi masing-masing dalam even-even olahraga di masing-masing negara;
- c) Menjalin hubungan, komunikasi dan kerjasama antar lembaga olahraga di kedua negara untuk memfasilitasi pertukaran pengalaman melalui pameran bersama, pertukaran bahan informasi serta iptek;
- d) Membina kerjasama bidang fasilitas olahraga, peralatan olahraga dan industri olahraga antara kedua negara;
- e) Pertukaran wasit, delegasi, pakar olahraga, dan atlet melalui partisipasi dalam program-program pendidikan, pelatihan, seminar, dan konferensi yang diadakan dimasing-masing negara;



- f) Memfasilitasi kerjasama antar organisasi olahraga yang berkenaan dengan menyewa atlet dan pelatih di segala bidang olahraga;
 - g) Kerjasama di bidang riset dan pengembangan olahraga;
 - h) Mengundang wasit untuk ikut serta di segala bidang olahraga yang diselenggarakan oleh federasi-federasi olahraga.
3. Kegiatan-kegiatan kerjasama lainnya di bidang kepemudaan dan olahraga kepemudaan yang diputuskan bersama oleh para Pihak.

PASAL 3 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Masing-masing Pihak harus melindungi, dalam wilayahnya, hak kekayaan intelektual pihak lain sesuai dengan hukum nasional yang berlaku di negara mereka masing-masing;
2. Jika pengaturan, program atau proyek tertentu dapat menghasilkan kekayaan intelektual, maka Para Pihak harus membuat pengaturan tersendiri sesuai dengan peraturan masing-masing.

PASAL 4 PENGATURAN KEUANGAN


Semua kegiatan kerjasama menurut Memorandum Saling Pengertian ini merujuk pada ketersediaan dana dan harus dianalisa dan disepakati bersama oleh para pihak.

PASAL 5 IMPLEMENTASI

Para Pihak sepakat melaksanakan Memorandum Saling Pengertian ini melalui perumusan pengaturan khusus. Pengaturan tersebut harus merinci masalah pembiayaan, tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat serta hal-hal terkait lainnya.

PASAL 6 PEMBATASAN KEGIATAN PERSONIL

Masing-masing Pihak harus menjamin bahwa personilnya yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini akan menghormati kebebasan politik, kedaulatan dan integritas wilayah negara tuan rumah, dan para personil tersebut berkewajiban untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara tuan rumah serta menghindari segala kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan dan maksud Memorandum Saling Pengertian ini.



**PASAL 7
PENYELESAIAN SENGKETA**

Setiap sengketa atau perbedaan yang timbul dalam hal penafsiran atau implementasi Memorandum Saling Pengertian ini harus diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi dan negosiasi antara Para Pihak melalui saluran diplomatik.

**PASAL 8
AMENDEMENT**

Memorandum Saling Pengertian ini dapat ditinjau ulang dan diubah atas dasar persetujuan bersama secara tertulis oleh Para Pihak, yang harus disampaikan melalui saluran diplomatik. Amendemen tersebut harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini.


**PASAL 9
MASA BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN**

1. Memorandum Saling Pengertian ini berlaku sejak tanggal penandatanganan;
2. Memorandum saling Pengertian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (lima) tahun, kecuali jika salah satu Pihak mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini melalui pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Memorandum Saling Pengertian ini;
3. Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan jangka waktu kegiatan, rencana, program dan proyek yang dibuat berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini hingga selesainya kegiatan, rencana, program, dan proyek tersebut.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, dengan telah diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.

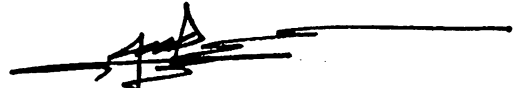
Dibuat rangkap dua di ~~Jakarta~~ pada tanggal21..... bulan ~~April~~ tahun ..2009.., dalam bahasa, Indonesia, Arab dan Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Jika terdapat perbedaan penafsiran atas Memorandum Saling Pengertian ini, maka naskah dalam Bahasa Inggris yang akan berlaku.

**UNTUK KEMENTERIAN NEGARA
PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,**

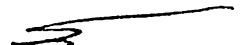


**ADHYAKSA DAULT
MENTERI**

**UNTUK KEMENTERIAN
KEBUDAYAAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA REPUBLIK SUDAN,**



**MOHAMMED YUSUF ABDALLA
MENTERI**





REPUBLIK INDONESIA

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE STATE MINISTRY OF YOUTH AND SPORTS AFFAIRS
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE MINISTRY OF CULTURE YOUTH AND SPORTS
OF THE REPUBLIC OF SUDAN
ON
YOUTH AND SPORTS COOPERATION**

The State Ministry of Youth and Sports Affairs of the Republic of Indonesia and the Ministry of Culture Youth and Sports of the Republic of Sudan, hereinafter referred to as "the Parties";

DESIRING to expand and strengthen the friendship between both countries and to promote cooperation between the Parties in youth and sports matters;

CONSIDERING the need to develop and foster the relations on youth and sports matters, as well as the cooperation between the two countries;

PURSUANT to the prevailing laws and regulations as well as policies of the respective countries;

HAVE AGREED as follows:

**Article 1
AIMS OF COOPERATION**

This Memorandum of Understanding aims to promote human resources development in the field of youth and sports between the Parties on the basis of reciprocity, mutual understanding and benefit.

Article 2
FIELDS OF COOPERATION

The Parties endeavor to promote cooperation in the following areas:

1. Youth Matters:

- a) Visit exchange of youth, government officials in charge of youth policy making or representative of youth organizations;
- b) Extension of invitations to international conferences or seminars on youth matters held in each country;
- c) Exchanging of information on youth matters;
- d) Encouraging the participation in youth camps, youth festivals, and other youth events held in each country;
- e) Exchanging of training of youth in leadership, entrepreneurship, and empowerment;
- f) Exchanging in make-up of youth facilities and basic facilities;
- g) Area development cooperation entrepreneurship of youth;
- h) Encouraging youth tourism and make it a way to deepen mutual knowledge of the civilization of the other party, support peace and strengthen friendship;
- i) Encouraging the cooperation between Youth organization and non governmental centers from both country.
- j) Cooperation in science area and technology on youth.

2. Sports Matters:

- a) Encouraging exchange in the fields of competitive sports, recreational sports, and educational sports;
- b) Encouraging the participation of the respective delegations in sports events held in each country;
- c) Establishing contacts, communication, and collaboration between sports institutions of the two countries to facilitate exchange of experience through joint exhibition, exchange of information materials, as well as science and technology;
- d) Establishing cooperation on sport facilities, sport equipments, and sport industry between the two countries;
- e) Exchanging of referees, sports delegation, experts and athletes through the participation in education programs, trainings, seminars, and conferences held in each country;

- f) Facilitating cooperation among sports organization, with regards to hiring athletes and coaches in all fields of sports;
 - g) Collaboration in the area of sports research and development.
 - h) Inviting referees to participate in allsports fields organized by the sports federations.
3. Any other cooperative activities on youth and sport matters jointly decided upon by the Parties.

Article 3
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

1. Each Party shall protect, within its territory, intellectual property rights of other Party in accordance with the domestic law in force in their respective country.
2. In case specific arrangement, programs or project may result in intellectual property, the Parties shall include separate arrangement in accordance with their respective regulations.

Article 4
FINANCIAL CONDITIONS

All cooperative activities under this Memorandum of Understanding shall be subject to the availability of funds and must be analyzed and mutually agreed by the Parties.

Article 5
IMPLEMENTATION

The Parties shall agree to implement this Memorandum of Understanding through the exchange of documents which shall be conducted through direct dialogue or diplomatic channels. Such documents shall specify the financial matters of the Memorandum of Understanding, responsibilities of the Parties involved, and other related matters.

Article 6
LIMITATION OF ACTIVITIES OF PERSONNEL

Each Party shall assure that its personnel involved in the activities related to this Memorandum of Understanding shall respect political independence, sovereignty, and territorial integrity of host country, shall have a duty not to interfere in internal affairs of the host county and will avoid any activities inconsistent with the purpose and objectives of this Memorandum of Understanding.

Article 7
SETTLEMENT OF DISPUTES

Any disputes or differences arising out of the interpretation or implementation of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through consultations and/or negotiations through diplomatic channels between the Parties.

Article 8
AMENDMENT

This Memorandum of Understanding may be reviewed and amended by mutual written consent by the Parties, which shall be submitted through diplomatic channels. The amendment shall form an integral part of this Memorandum of Understanding.

Article 9
ENTRY INTO FORCE, DURATION, AND TERMINATION

1. This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of its signing;
2. This Memorandum of Understanding shall be in force for a period of 3 (three) years, and may be automatically extended unless either Party terminates it by giving written notification 6 (six) months prior to the expiration, through diplomatic channel;
3. The termination of this Memorandum of Understanding shall not affect the validity and duration of any activities, plans, programs, and projects made under this Memorandum of Understanding until the completion of such activities, plans, programs, and projects.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Memorandum of Understanding.

Done in duplicate in *Jakarta* on this *21* day of *April* in the year *2004*, in the Indonesian, Arabic, and English languages, all text are being equally authentic. In case of any divergence of interpretation of this Memorandum of Understanding, the English text shall prevail.

**FOR THE STATE MINISTRY OF
YOUTH AND SPORTS AFFAIRS
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**



**DR. ADHYAKSA DAULT
MINISTER**

**FOR THE MINISTRY OF
CULTURE YOUTH AND SPORTS
OF THE REPUBLIC OF SUDAN**



**MOHAMMED YUSUF ABDALLA
MINISTER**



REPUBLIK INDONESIA

مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الشبابية والرياضة بجمهورية إندونيسيا

و
وزارة الثقافة والشباب والرياضة بجمهورية السودان
في مجال التعاون الشبابي والرياضي

أن وزارة الشباب والرياضة بجمهورية إندونيسيا ووزارة الثقافة والشباب والرياضة بجمهورية السودان والذين يشار إليهما فيما بعد بالطرفين.

رغبة منهما في تقوية أواصر الصداقة بين بلديهما وتعزيز سبل التعاون في مجال الشباب والرياضة.

وانطلاقاً من رغبتهما في تطوير وتقوية العلاقات في مجال الشباب والرياضة وإيماناً منهما بأن هذا التعاون سيلعب دوراً مهماً في تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين.

قد اتفقا على الآتي :

المادة الأولى

أهداف التعاون

تهدف مذكرة التفاهم هذه لتطوير التعاون في مجال الشباب والرياضة بين البلدين.

المادة الثانية

مجالات التعاون

اتفق الجانبان على التعاون في المجالات الآتية :

1. الشباب :

- (أ) تبادل زيارات الوفود الشبابية وزيارة المسؤولين عن وضع سياسات الشباب في الدولة ودعم المؤسسات والمنظمات العاملة في مجال الشباب .
- (ب) تبادل الدعوات للمؤتمرات والسمنارات الشبابية التي تعقد في كلا البلدين.
- (ت) تبادل المعلومات في مجال الشباب.
- (ث) تشجيع مشاركة شباب البلدين في المخيمات والاحتفالات الشبابية التي تقام في كلا البلدين.

- (ج) تبادل التدريب بين البلدين في مجالات إعداد القادة ، وفي مجال توظيف الشباب وتمكينهم.
- (ح) التعاون في مجال تقديم التسهيلات الأساسية للشباب.
- (خ) التعاون في مجال تطوير أعمال الشباب.
- (د) تشجيع الشباب على السياحة وتوظيفها لتعميق المعرفة بالحضارات في كلا البلدين لدعم السلام وتقوية أواصر الصداقة.
- (ذ) تشجيع التعاون في مجال المنظمات الشبابية وإدارة مراكز الشباب.
- (ر) التعاون في مجال العلوم والتقنية.

2. الرياضة :

- (أ) تشجيع التبادل في مجالات التنافس الرياضي والرياضة الترفيهية والتربية الرياضية.
- (ب) تشجيع مشاركة الوفود الرياضية من الجانبين في المناسبات الرياضية في كلا البلدين
- (ت) إنشاء قنوات للتواصل بين المؤسسات الرياضية بين البلدين مع تسهيل تبادل الخبرات عبر المعارض وسبل تقنية الاتصالات خاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا.
- (ث) إنشاء التعاون الرياضي في مجالات المعدات الرياضية وصناعة الأدوات الرياضية.
- (ج) تبادل الحكام والدوريات العلمية والوفود الرياضية، التمثيل في البرامج التعليمية، التدريب، السمنارات، المؤتمرات، التي تعقد في كلا البلدين.
- (ح) تسهيل التعاون عبر الاتحادات الرياضية بمشاركة اللاعبين والمدربين في جميع مجالات الرياضة.
- (خ) التعاون في مجال الدراسات والبحوث الرياضية.
- (د) دعوة مسئول ومشرفي الرياضة لتمثيل بلديهما في المناسبات الرياضية التي يتم تنظيمها بواسطة الاتحادات الرياضية.

المادة الثالثة

حقوق الملكية الفكرية

- (1) يعمل كلا الجانبين عبر القنوات الرسمية على حماية حقوق الملكية الفكرية مع الأخذ في الاعتبار القوانين السائدة في كل دولة.
- (2) في حالة إقامة المشروعات التي قد تؤثر على برامج حقوق الملكية الفكرية يقوم الجانبان بتنظيم النشاط كل على حدة مع التقيد بالأسس والضوابط.

المادة الرابعة

الشروط المالية

كل الأنشطة التي تضمنتها مذكرة التفاهم تعتبر ملزمة وينبغي توفير الدعم المالي اللازم لتنفيذها.

المادة الخامسة

التطبيق

(1) على الجانبان تطبيق مذكرة التفاهم عبر تبادل الوثائق من خلال الاتصال المباشر أو عبر القنوات الدبلوماسية ، تلك الوثائق التي تحدد الجوانب المالية المشار إليها بالمذكرة وتحديد مسؤولية كل طرف والموضوعات الأخرى ذات الصلة.

المادة السادسة

نفاذ وسريان مذكرة التفاهم

على الجانبين الموقعين على بنود مذكرة التفاهم هذه التقيد بتنفيذ الأنشطة الواردة فيها ودعمها وعدم تجاوزها مع مراعاة القوانين السائدة في القطر المضيف والالتزام بضوابط البلد المضيف وان يتجنب الجانبان أي أنشطة تخالف ما جاء بمذكرة التفاهم.

المادة السابعة

حل النزاعات (إزالة نقاط سوء التفاهم)

أي نزاع أو خلاف ينشأ خلال تطبيق بنود هذه المذكرة يجب أن يحل عبر المحادثات التي تتم عن طريق القنوات الدبلوماسية بين الطرفين.

المادة الثامنة

التعديلات

أي تعديل أو تصحيح لهذه المذكرة يجب أن يكون بقبول الطرفين ويعبر عنه كتابة وذلك عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة التاسعة

مدة سرّيان مذكرة التفاهم

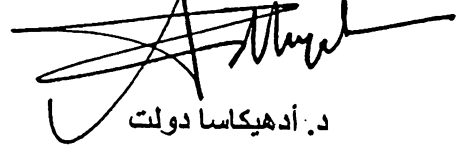
- (1) تدخل مذكرة التفاهم حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليها.
- (2) وتظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات تجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يبد أحد الطرفين الرغبة في إنهائها وذلك قبل ستة أشهر من انتهاء تاريخ الاتفاقية.
- (3) على الجانبين التقيد بتنفيذ الأنشطة والخطط والبرامج الواردة بهذه المذكرة وذلك قبل نهاية مدتها.

حررت في مدينة جاكرتا في اليوم الحادي والعشرين من شهر أبريل 2009م من ثلاثة نسخة أصلية باللغة العربية والإنجليزية والإندونيسية ولكل نسخة نفس الحجية القانونية في حالة التضارب تعتبر النسخة الإنجليزية هي المرجع الأساسي.

عن جمهورية السودان

محمد يوسف عبد الله
وزير الثقافة والشباب والرياضية
جمهورية السودان

عن جمهورية إندونيسيا



د. أدھيكاسا دولت
وزير الشباب والرياضة
جمهورية إندونيسيا